



Ref: SSA/093/19/EML

Date: 26 July 2019

To: All SSA Members

**INDONESIA MINISTRY OF TRANSPORTATION'S NEW REGULATION CONCERNING  
INSTALLATION AND ACTIVATION IDENTIFICATION SYSTEMS FOR SHIPS SAILING  
IN INDONESIAN WATERS**

SSA understands that the Indonesian Ministry of Transportation has promulgated a new regulation on 20 February 2019, which requires **Indonesian and foreign-flagged ships** sailing in Indonesian waters to install and activate the Automatic Identification System (AIS).

The regulation is meant to improve safety and security and will take effect 20 August 2019.

The first document is the original MOT regulations published in February – attached as **Annex A**. The translated document is attached as **Annex B**.

You may find the two Annexes here.

Members are strongly advised to adhere to the new regulation from the Indonesian Authorities.

Thank you.

Best Regards,  
Wong ShuYi  
Executive Officer



**MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR PM 7 TAHUN 2019  
TENTANG  
PEMASANGAN DAN PENGAKTIFAN SISTEM IDENTIFIKASI OTOMATIS BAGI  
KAPAL YANG BERLAYAR DI WILAYAH PERAIRAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (3) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian dan *International Maritime Organization Resolution A. 1052 (27) adopted on 30 November 2011 concerning Procedures for Port State Control*, untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan pelayaran, setiap kapal wajib memasang dan mengaktifkan Sistem Identifikasi Otomatis (*Automatic Identification System (AIS)*);
- b. bahwa dalam *Memorandum of Understanding on Port State Control in the Asia-Pacific Region (Tokyo MOU)* diatur ketentuan mengenai sanksi atas pelanggaran penggunaan Sistem Identifikasi Otomatis (*Automatic Identification System (AIS)*);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pemasangan dan Pengaktifan Sistem Identifikasi Otomatis bagi Kapal yang Berlayar di Perairan Indonesia;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 30 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Distrik Navigasi;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Penyelenggara Pelabuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1184);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 34 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran Utama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 627);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 76 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1183);

9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1360);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PEMASANGAN DAN PENGAKTIFAN SISTEM IDENTIFIKASI OTOMATIS BAGI KAPAL YANG BERLAYAR DI PERAIRAN INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Perairan Indonesia adalah laut teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalaman.
2. Sistem Identifikasi Otomatis (*Automatic Identification System*) yang selanjutnya disebut AIS adalah sistem pemancaran radio *Very High Frequency* (VHF) yang menyampaikan data-data melalui *VHF Data Link* (VDL) untuk mengirim dan menerima informasi secara otomatis ke kapal lain, Stasiun *Vessel Traffic Services* (VTS), dan/atau stasiun radio pantai (SROP).
3. AIS Klas A adalah sistem pemancaran radio VHF yang menyampaikan data melalui VDL untuk mengirim dan menerima data statik dan data dinamik kapal secara otomatis.

4. AIS Klas B adalah sistem pemancaran radio VHF yang menyampaikan data melalui VDL untuk mengirim data kapal secara otomatis.
5. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
6. Kapal Berbendera Indonesia adalah Kapal yang telah didaftarkan dalam daftar Kapal Indonesia.
7. Kapal Asing adalah Kapal yang berbendera selain berbendera Indonesia dan tidak dicatat dalam daftar Kapal Indonesia.
8. Syahbandar adalah pejabat pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.

#### Pasal 2

Peraturan Menteri ini mengatur mengenai pemasangan dan pengaktifan AIS pada Kapal Berbendera Indonesia dan pengawasan pengaktifan AIS pada Kapal Asing yang berlayar di wilayah Perairan Indonesia.

#### Pasal 3

Kapal Berbendera Indonesia dan Kapal Asing yang berlayar di wilayah Perairan Indonesia wajib memasang dan mengaktifkan AIS.

### BAB II

#### TIPE DAN PERSYARATAN SISTEM IDENTIFIKASI OTOMATIS

#### Pasal 4

Tipe AIS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:

- a. AIS Klas A; dan
- b. AIS Klas B.

Pasal 5

- (1) AIS Klas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a wajib dipasang dan diaktifkan pada Kapal Berbendera Indonesia yang memenuhi persyaratan Konvensi *Safety of Life at Sea* (SOLAS) yang berlayar di wilayah Perairan Indonesia.
- (2) AIS Klas B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b wajib dipasang dan diaktifkan pada Kapal Berbendera Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Kapal penumpang dan Kapal barang Non Konvensi dengan ukuran paling rendah GT 35 (tiga puluh lima *Gross Tonnage*) yang berlayar di wilayah Perairan Indonesia;
  - b. Kapal yang berlayar antar lintas negara atau yang melakukan *barter-trade* atau kegiatan lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan; dan
  - c. Kapal penangkap ikan berukuran dengan ukuran paling rendah GT 60 (enam puluh *Gross Tonnage*).
- (3) Untuk lebih meningkatkan keselamatan dan keamanan pelayaran, Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan pemasangan dan pengaktifan AIS Klas A.

Pasal 6

- (1) Nakhoda wajib mengaktifkan dan memberikan informasi yang benar pada AIS.
- (2) Informasi AIS Klas A terdiri atas:
  - a. data statik terdiri atas:
    1. nama dan jenis Kapal;
    2. tanda panggilan (*call sign*);
    3. kebangsaan Kapal;
    4. *Maritime Mobile Services Identities* (MMSI);
    5. *International Maritime Organization* (IMO) *Number*;
    6. Bobot Kapal;
    7. sarat (*draught*) Kapal; dan
    8. panjang dan lebar Kapal; dan

- b. data dinamik terdiri atas:
  - 1. status navigasi;
  - 2. titik koordinat Kapal;
  - 3. tujuan berlayar dengan perkiraan waktu tiba;
  - 4. kecepatan Kapal; dan
  - 5. haluan Kapal.
- (3) Informasi AIS Klas B terdiri atas:
  - a. nama dan jenis Kapal;
  - b. kebangsaan Kapal;
  - c. MMSI;
  - d. titik koordinat Kapal;
  - e. kecepatan Kapal; dan
  - f. haluan Kapal.

#### Pasal 7

Dalam hal AIS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tidak berfungsi, nakhoda wajib menyampaikan informasi kepada SROP dan/atau Stasiun VTS, serta mencatat kejadian tersebut pada buku catatan harian (*log book*) Kapal yang dilaporkan kepada Syahbandar.

#### Pasal 8

- (1) Menteri melaksanakan pemantauan AIS secara langsung (*terrestrial*) dan melalui satelit.
- (2) Menteri dalam melaksanakan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan menteri terkait.
- (3) Pemantauan AIS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk menerima informasi dari AIS Kapal ke SROP dan/atau Stasiun VTS, serta untuk memonitor pergerakan Kapal.

### BAB III

#### SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 9

- (1) Bagi Kapal Berbendera Indonesia yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 dikenakan sanksi administratif berupa penangguhan pemberian surat persetujuan berlayar sampai dengan terpasang dan aktifnya AIS di atas Kapal.

- (2) Nakhoda yang selama pelayaran tidak mengaktifkan AIS dan tidak memberikan informasi yang benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan sertifikat pengukuhan (*Certificate of Endorsement (COE)*).

#### Pasal 10

Kapal Asing yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikenakan sanksi sesuai ketentuan Tokyo MOU dan perubahannya.

### BAB IV

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 11

- (1) Menteri melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pemasangan dan pengaktifan AIS.
- (2) Pengawasan penggunaan AIS dilakukan oleh petugas Stasiun VTS, petugas SROP, pejabat pemeriksa keselamatan Kapal, dan pejabat pemeriksa kelaiklautan Kapal Asing.
- (3) Dalam hal AIS tidak aktif, petugas Stasiun VTS, petugas SROP, pejabat pemeriksa keselamatan Kapal, dan pejabat pemeriksa kelaiklautan Kapal Asing menyampaikan informasi kepada Syahbandar terdekat.

### BAB V

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 12

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Februari 2019

MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Februari 2019

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

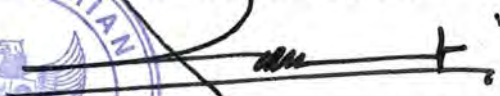
ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 175

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM



  
WAHJU ADJI H., SH, DESS  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP. 19651022 199203 1 001

REGULATION OF THE MINISTER OF COMMUNICATION OF THE  
REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER PM 7 OF 2019 CONCERNING  
INSTALLATION AND ACTIVATION OF AUTOMATIC IDENTIFICATION  
SYSTEMS FOR SHIPS SAILING IN THE AREA OF INDONESIA WITH THE  
BLESSINGS OF THE ALMIGHTY GOD THE MINISTER OF  
COMMUNICATION,

Considering:

- a. that based on the provisions of Article 14 paragraph (3) letter a Government Regulation Number 5 of 2010 concerning Navigation and the International Maritime Organization Resolution A. 1052 (27) adopted on November 30, 2011 concerning the Procedures for Port State Control, to improve shipping safety and security, each ship must install and activate an Automatic Identification System. System (AIS));
- b. that in the Memorandum of Understanding on Port State Control in the Asia-Pacific Region (Tokyo MOU) there are provisions regarding sanctions for violations of the use of Automatic Identification System (AIS);
- c. that based on the considerations as referred to in letter a and letter b, it is necessary to stipulate a Minister of Transportation Regulation concerning the Installation and Activation of Automatic Identification Systems for Ships Sailing in Indonesian Waters;

Remember

1. Law Number 39 of 2008 concerning State Ministries (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2008 Number 166, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4916);
2. Law Number 17 Year 2008 concerning Shipping (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2008 Number 64, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4849);
3. Presidential Regulation Number 7 of 2015 concerning Organization of State Ministries (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2015 Number 8);
4. Presidential Regulation Number 40 of 2015 concerning Ministry of Transportation (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2015 Number 75);

5. Decree of the Minister of Transportation Number KM 30 of 2006 concerning the Organization and Work Procedure of District Navigation;
6. Regulation of the Minister of Transportation Number KM 62 Year 2010 concerning the Organization and Work Procedure of Port Operator Units as amended several times, the latest by Minister of Transportation Regulation Number PM 77 of 2018 concerning Third Amendment to Minister of Transportation Regulation Number KM 62 of 2010 concerning Organization and Work Procedure of Port Operator Units (State Gazette Republic of Indonesia in 2018 Number 1184);
7. Minister of Transportation Regulation Number PM 34 Year 2012 concerning Office Organizations and Work Procedures Kesyahbandaran Utama (Official Gazette of the Republic of Indonesia in 2012 Number 627);
8. Minister of Transportation Regulation Number PM 36 Year 2012 concerning Office Organizations and Work Procedures Port Authority and Port Authority as amended several times, the latest by the Minister of Transportation Regulation Number PM 76 of 2018 concerning Second Amendment to the Minister of Transportation Regulation Number PM 36 of 2012 concerning Organization and Work Procedure of the Port Authority and Port Authority Office (Official Gazette of the Republic of Indonesia in 2018 Number 1183);
9. Minister of Transportation Regulation Number PM 93 of 2018 concerning the Organization and Work Procedure of the Batam Port Port Authority and Special Authority Office (Official Gazette of the Republic of Indonesia Year 2018 Number 1360);
10. Minister of Transportation Regulation Number PM 122 Year 2018 concerning Organization and Work Procedure of the Ministry of Transportation (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2018 Number 1756);

**DECIDES:**

**REGULATION OF THE MINISTER OF COMMUNICATION CONCERNING  
INSTALLATION AND ACTIVATION OF AUTOMATIC IDENTIFICATION  
SYSTEMS FOR SHIPS SAILING IN INDONESIAN WATERS.**

## CHAPTER I GENERAL PROVISIONS

### Article 1

In this Ministerial Regulation what is meant by:

1. Indonesian waters are Indonesia's territorial sea along with its archipelagic waters and inland waters.
2. Automatic Identification System, hereinafter referred to as AIS, is a Very High Frequency (VHF) radio broadcasting system that delivers data through VHF Data Link (VDL) to send and receive information automatically to other vessels, Vessel Stations, Traffic Services (VTS), and / or coastal radio stations (SRPP).
3. AIS Class A is a VHF radio transmitting system that delivers data through VDL to send and receive static data and ship dynamic data automatically.
4. AIS Class B is a VHF radio transmitting system that delivers data through VDL to send ship data automatically.
5. Ships are water vehicles of certain shapes and types, which are driven by wind power, mechanical power, other energy, are withdrawn or postponed, including dynamically supported vehicles, vehicles under the surface of the water, and floating tools and floating buildings that do not move -move.
6. Indonesian-flagged vessels are vessels that have been registered in the list of Indonesian ships.
7. Foreign Vessels are vessels that are flagged other than Indonesian flags and are not recorded in the list of Indonesian ships.
8. Shahbandar is a government official at the port who is appointed by the Minister and has the highest authority to carry out and supervise the fulfillment of the provisions of the legislation to guarantee shipping safety and security.

### Article 2

This Ministerial Regulation regulates the installation and activation of AIS on Indonesian-flagged vessels and supervision of activation of AIS on foreign vessels sailing in Indonesian waters.

### Article 3

Indonesian-flagged ships and foreign vessels sailing in Indonesian waters must install and activate AIS.

## CHAPTER II TYPES AND REQUIREMENTS FOR AUTOMATIC IDENTIFICATION SYSTEMS

### Article 4

Type AIS as referred to in Article 3 consists of:

- a. AIS Class A; and
- b. AIS Class B.

### Article 5

(1) AIS Class A as referred to in Article 4 letter a must be installed and activated on Indonesian-flagged vessels that meet the requirements of the Convention on Safety of Life at Sea (SOLAS) that sail in Indonesian waters.

(2) AIS Class B as referred to in Article 4 letter b must be installed and activated on Indonesian flagged vessels with the following conditions:

- a. Passenger ships and Non Convention goods ships with the lowest size of GT 35 (thirty five Gross Tonnage) sailing in Indonesian waters;
- b. Ships sailing between countries or barter-trade or other activities regulated in the provisions of legislation in the customs sector; and
- c. The fishing vessels of the lowest size are GT 60 (sixty Gross Tonnage).

(3) To further improve shipping safety and security, ships as referred to in paragraph (2) can be installed and activated by AIS Class A.

### Article 6

(1) The skipper must activate and provide correct information on AIS.

(2) Information on AIS Class A consists of:

- a. Static data consists of:
  1. name and type of ship;
  2. call sign,
  3. Ship nationality;
  4. Maritime Mobile Services Identities (MMSI);
  5. International Maritime Organization (IMO) Number,
  6. Ship Weight;
  7. Ship draft; and

8. Ship length and width; and
- b. dynamic data consists of:
  1. navigation status;
  2. ship coordinates;
  3. sailing destination with estimated arrival time;
  4. Ship speed; and
  5. ship's bow.
- (3) Information on AIS Class B consists of:
  - a. name and type of ship;
  - b. nationality of the ship;
  - c. MMSI;
  - d. coordinates of the ship;
  - e. speed of the Ship; and
  - f. bow of the ship.

#### Article 7

In the event that the AIS as referred to in Article 6 does not function, the skipper must submit information to the SROP and / or VTS Station, and record the incident in the ship's logbook reported to Syahbandar.

#### Article 8

- (1) The Minister carries out direct (terrestrial) AIS monitoring and via satellite.
- (2) The Minister in carrying out the monitoring as referred to in paragraph (1) may coordinate with the relevant minister.
- (3) Monitoring of AIS as referred to in paragraph (1) functions to receive information from AIS Ship to SROP and / or VTS Station, and to monitor ship movements.

## CHAPTER III ADMINISTRATION SANCTIONS

### Article 9

(1) For Indonesian flagged vessels that do not carry out obligations as intended in Article 3, administrative sanctions shall be imposed in the form of suspension of the issuance of a letter of approval to sail until the installation and activation of AIS is on board.

(2) The skipper who during the voyage does not activate AIS and does not provide the correct information as referred to in Article 6 paragraph (1) is subject to administrative sanctions in the form of a Certificate of Endorsement (COE) revocation.

### Article 10

Foreign vessels that do not carry out their obligations as referred to in Article 3 are subject to sanctions in accordance with the Tokyo MOU provisions and their amendments.

## CHAPTER IV DEVELOPMENT AND SUPERVISION

### Article 11

(1) The Minister carries out guidance and supervision on the installation and activation of AIS.

(2) Supervision of AIS use is carried out by VTS Station officers, SROP officers, Ship safety inspectors, and foreign ship marine reliability officers.

(3) In the event that AIS is not active, VTS Station officers, SROP officers, Ship safety inspectors, and Foreign Ship worthiness inspectors present information to the nearest Shahbandar.

## CHAPTER V CLOSING PROVISIONS

### Article 12

This Ministerial Regulation comes into force after 6 (six) months from the date of promulgation. In order for everyone to know, order the enactment of this Ministerial Regulation by placing it in the State Gazette of the Republic of Indonesia.

20 Feb 2019